



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PARIWISATA
JL.KOMPLEK PERTANIAN PADANG TUJUH



RENJA (RENCANA KERJA)
DINAS PARIWISATA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 dapat diselesaikan. Renja Dinas Pariwisata merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Dinas Pariwisata yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perencanaan pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan kegiatan bersifat indikatif untuk tahun 2022.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan turunan dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021 – 2026 yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.. Rencana Kerja yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan Dinas Pariwisata untuk tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memerlukan penjabaran konkret dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Dinas Pariwisata untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Pariwisata.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Simpang Empat, November 2021

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



DECKY HARMIKO SAHPUTRA, SH
NIP. 19791207 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Landasan Hukum.....	2
1. 3. Maksud dan Tujuan	3
1. 4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PASAMAN BARAT.....	
2. 1. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi	6
2.1.1 Struktur Organisasi.....	7
2. 2. 1. Tugas Kepala Dinas Pariwisata....	9
2. 2. 2. Sekretariat Dinas Pariwisata.....	10
2. 2. 3. Bidang Destinasi.....	13
2. 2. 4. Bidang Objek, Daya Tarik dan Atraksi.....	16
2. 2. 5. Bidang Pengembangan SDM, Usaha Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	18
2. 2. 6. Bidang Promosi Dan Pelayanan Data.....	22
2. 2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kab.Pasaman Barat.....	25
2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata sertaTantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kab.Pasaman Barat	27
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	34
BAB III PERMASAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	36
3. 2. Telaahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah	38
3. 3. Telaahan Renstra K/L.....	41
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	45
3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	
4. 1. Tujuan Pembangunan	52

4. 2. Sasaran.....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB VIII PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah peranannya semakin penting dalam memetakan potensi yang ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan, sehingga strategi yang dirumuskan melalui implementasi sistem perencanaan dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga wajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan pedoman kerja bagi Dinas Pariwisata selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada Dinas Pariwisata dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata.

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Kab. Pasaman Barat. Renja Dinas Pariwisata Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun berjalan (2021), indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, Meningkatnya Daya Tarik Destinasi dan Pemasaran Wisata, Berkembangnya Industri Kreatif Daerah.

Renja Dinas Pariwisata Kab. Pasaman Barat disusun secara terpadu, partisipatif, demokratis yang dihasilkan melalui proses pemikiran strategis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan OPD. Pada tahapan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pasaman Barat tahun 2022. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Taman Bumi (Geopark);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dn Tata Kerja Dinas Pariwisata;
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2021;

22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Pariwisata serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data-data kepariwisataan yang lengkap dan akurat .
2. Terlaksananya event pariwisata tahunan, paket wisata , wisata religi, wisata alam pantai, dan usaha kuliner.
3. Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal yang spesifik khususnya Geopark Talamau
4. Terlaksananya pengembangan pariwisata secara berhasil guna dan berdaya saing.
5. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SOPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2020 Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 5 (Lima) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar Rp 4.685.228.096,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 4.346.785.411,- (Empat milyar tiga ratus empat puluh enan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah) dengan persentase daya serap sampai Desember 2020 adalah sebesar 92,78%.

Anggaran Dinas Pariwisata tahun 2020 tersebar pada 4 (empat) bidang, 1 sekretariat yang digunakan untuk membiayai 5 (lima) program. Berikut rincian realisasi Kelima program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran program ini sebesar Rp 670.231.096,- dan terealisasi sebesar Rp 649.871.084,- atau 96,96 % dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Anggaran program ini sebesar Rp 164.294.000,- dan terealisasi sebesar Rp 162.141.400,- atau 98,69 % dengan realisasi fisik 100%.

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Anggaran program ini sebesar Rp 3.431.767.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.120.741.627,- dengan realisasi keuangan 90,93% dan realiasi fisik sebesar 100%.

4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Anggaran program ini sebesar Rp 335.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp 331.002.700,- atau 98,73 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %

5. Program Pengembangan Industri Kreatif

Anggaran program ini sebesar Rp 83.686.000,- dan terealisasi sebesar Rp 83.028.600,- atau 99,21 % dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja keseluruhan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan sudah bisa dikatakan dalam kategori berhasil walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1.1 berikut ini :

Tabel 2.1.2.
Evaluasi Realisasi Kinerja DISPAR Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

NO	KEGIATAN	KELUARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI			PERMASA LAHAN
				KEUANGAN		FISIK	
				Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyedian pelayanan administrasi perkantoran	Persentase realisasi keuangan	390.401.096	379.037.334	97,09	100	
2	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparat	Jumlah Barang Milik yang dikelola Dinas Pariwisata Daerah	110.832.000	101.840.750	91,89	100	
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	168.998.000	168.993.000	100,00	100	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
4	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	164.294.000	162.141.4000	98,69	100	
	Program Pengembangan Destinasi Wisata						

5	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Percentase pengadaan	3.274.947.000	2.964.239.877,00	90,51	92,5	
6	Fasilitasi geopark talamau	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan	156.820.000	156.501.750	99,80	100	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						
7	Pergelaran kesenian daerah	Percentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	335.250.000	331.002.700	98,73	100	
	Program Pengembangan Industri Kreatif						
8	Pengembangan industri kreatif berbasis desain dan IPTEK	Percentase kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	83.686.000	83.028.600	99,21	95	
	JUMLAH			4.685.228.096	4.346.785.411	92,78	100

Pada tahun 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan serta 18 (delapan belas) sub kegiatan, dan besaran anggaran sesuai dengan APBD sebesar Rp 4.717.516.184,- (Empat miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah)

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata. Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Adapun informasi yang didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

- I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dibawah 75% tidak ada

- II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diatas 75 %, antara lain:
 1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan
 - 1) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur
 - 3) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi kegiatan
 - 1) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
 3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang meliputi kegiatan
 - 1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - 2) Fasilitasi Geopark Talamau

4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya yang meliputi kegiatan
 - 1) Pagelaran Kesenian Daerah
5. Program Pengembangan Industri Kreatif yang meliputi kegiatan
 - 1) Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Desain dan IPTEK

Faktor – faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pencapaian target OPD antara lain misalnya :

- a. Terlambatnya pengesahan anggaran
- b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan
- c. Tidak sesuaianya biaya belanja barang dengan yang telah direncanakan
- d. Kenaikan indek harga satuan barang
- e. Adanya kejadian luar biasa (seperti: bencana banjir, gempa bumi dst)
- f. Atau faktor lainnya

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat semua kegiatan dapat terealisasi, namun ada satu kegiatan yang realisasinya rendah. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021 di sajikan pada tabel 2.1.2 sebagai berikut :

Penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021, disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan, sasaran dan target indikator yang akan dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021 -2026 dan target tahun 2022 sbb:

**Tabel 2.1.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan Laju pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,68	0,70	0,72	0,73	0,75	0,78	0,78
	1.Meningkatnya daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	225.200	247.720	272.492	313.365	360.365	414.419	414.419
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,87	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8
		2.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	14%	15%	16%	17%	18%	20%	20%
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata		Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3
		Persentase Penurunan Temuan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB

		Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3
		Persentase Penurunan Temuan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100 %

Tabel 2.1.4
Target Rencana Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Orang	247.720
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1,2
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif	%	15
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Nilai	B
		Level Maturitas SPIP	Nilai	2
		Persentase Penurunan Temuan BPK	%	80%

Realisasi pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah untuk tingkat capaian tertinggi pada indikator kinerja adalah Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif dari target 11% dan terealisasi menjadi 20% . Sektor Ekonomi Kreatif di Pasaman Barat berkembang sekitar tahun 2019 dengan jumlah 5 sub sektor ekonomi kreatif. Tahun 2020 bertambah menjadi 6. Beberapa diantaranya sudah ada yang dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasaman Barat. Data sub sektor Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 yaitu :

1. Kriya

- Terdiri dari :
1. Kriya Batok Kelapa Qarisha di Kajai
 2. Rajutan Tinajoe Macarame di Lubuak Landua
 3. Kriya dari bahan sampah Tuah Basamo di Kapar

2. Kuliner

- Terdiri dari :
1. Rendang Lokan Langkok di Maligi
 2. Kopi Rajo Talu di Talu
 3. Gula Semut/Palm Sugar di Kajai
 4. Dodol Mangrove di Maligi

3. Fashion

- Terdiri dari :
1. Batik di Desa Baru
 2. Tenunan Songet di Padang Tujuh
 3. Sulam Emas di Air Bangis

4. Film, Animasi dan Video

- Terdiri dari :
1. Eko Darmawan (Chanel Youtube Tuah Talamau)
 2. Wais Karman (Chanel Youtube wais karman)

5. Desain Produk

- Terdiri dari :
1. Agil di Sasak
 2. Yana di Maligi

6. Fotografi

Saat ini sudah terdaftar sebanyak 16 fotografi

Pada indikator Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari target pengunjung sebanyak 360.800 orang dan terealisasi sebanyak 246.360 orang (68,26%). Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini terjadi akibat pandemi covid 19 dengan adanya kebijakan PSBB dan PPKM sehingga banyak objek

wisata yang ditutup dan dibatasi pengunjungnya.

Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.5 sebagai berikut :

Tabel 2.1.5
Penilaian Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Predikat
1	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	360.800	246.360	68,28%	Kurang
2	Persentase Peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif	11 %	20 %	136,3 %	Sangat Baik
3	Peningkatan nilai SAKIP	B	CC	87,5 %	Baik
4	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	67 %	Kurang
5	Opini terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Sangat Baik

Hasil capaian atas 5 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian sebagaimana uraian pada Tabel 2.1.5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terlaksana dengan prediket “sangat baik” sebanyak 2 indikator;
- Terlaksana dengan prediket “baik” sebanyak 1 indikator;
- Terlaksana dengan prediket “kurang” sebanyak 2 indikator

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan, kepariwisataan .
- b. Merumuskan kebijakan peningkatan mutu sarana prasarana pariwisata.
- c. Memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang Kepariwisataan yang meliputi perumusan kebijakan Daerah serta menyusun program dibidang pariwisata,memimpin,mengordinasi,mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pariwisata mempertangung jawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi dibidang pariwisata,serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas,membina unsur – unsur dinas dan mengembangkan tugas tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tatausaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional,mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, LAKIP,LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat;
- g. Membuat telaahan staf dan mengoordinasikan tugas dan kegiatan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Penginventarisasi dan pendokumentasian di bidang Pariwisata daerah;
- j. Pembinaan dan pengembangan Pariwisata daerah;
- k. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pariwisata;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata (DISPAR) dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata (DISPAR) tahun 2016-2021. Pengukuran

pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata (DISPAR) Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2020 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.1 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM / standar nasional	Target Renstra Dinas Pariwisata				Realisasi Capaian Proyeksi		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatnya daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata		345.450	350.750	360.800	375.500	282.512	317.225	246.360	375.500	247.720
2	Berkembangnya Industri Kreatif Daerah		8%	9%	11%	13%	8%	9%	11%	14%	15%
3	Peningkatan nilai SAKIP		CC	B	B	B	C	CC	B	B	B
4	Level Maturitas SPIP		3	3	3	3	2	2	3	3	3
5	Opini terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kepariwisataan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai, terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Pasaman Barat itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

2. Lokasi objek wisata banyak berada di kawasan hutan lindung dan di kuasai oleh masyarakat.

Potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat belum dapat dikelola secara optimal, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta karena disebabkan objek wisata banyak berada di kawasan hutan lindung serta di kuasai oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait serta sosialisasi kepada masyarakat.

3. Rendahnya Aksesibilitas Menuju ke Obyek Wisata.

Secara umum kualitas jalan di Kabupaten Pasaman Barat sudah baik, tetapi aksesibilitas menuju destinasi tertentu masih harus difokuskan lagi sehingga dibutuhkan pembangunan dan peningkatan infrastuktur jalan menuju destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat .

4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat.

Dari 61 Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, yang tersentuh pembangunan sarana dan prasarana baru 17 destinasi wisata. Maka dapat disampaikan bahwa lebih kurang 28 % yang baru tersentuh, dan untuk target pencapaian pembangunan sarana dan prasarana di butuhkan 72 % yang direncanakan lima tahun ke depan .

5. Belum terbina dan tertatanya usaha ekonomi kreatif di destinasi Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk meningkatkan pendapatan (income) masyarakat dikawasan wisata dapat diakukan dengan melaksanakan pembinaan masyarakat setempat untuk mengelola dan menata

kegiatan usaha ekonomi kreatif , sehingga lima tahun kedepan diharapkan tercapainya target PAD Kabupaten Pasaman Barat.

6. Kurangnya dokumen dalam pengambilan kebijakan sebagai arahan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat.

Perlu penataan kelengkapan dokumentasi, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisataan Pasaman Barat.Serta harus ada pelatihan kepada *stakeholder* kepariwisataan untuk kegiatan penataan dan pengembangan destinasi.

7. Rendahnya Daya Saing Usaha Kepariwisataan.

Daya saing usaha pariwisata Kabupaten Pasaman Barat rendah, hal ini menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata, Promosi dan pemasaran. Sehingga memberikan implikasi pada pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan menyediakan lebih banyak event atau *atraksi* pariwisata akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

8. Terbatasnya Obyek Wisata Yang Sudah Tertata.

Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ternyata banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertatapun masih belum maksimal dalam penyajiannya.

9. Kurangnya Koordinasi Dan Persamaan Persepsi Diantara OPD Terkait.

Koordinasi merupakan hal yang penting didalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, untuk mewujudkan percepatan dalam penyusunan Programa (Program bersama) bidang kepariwisataan antar OPD Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam Meningkatkan pembinaan sarana prasarana objek wisata dibutkan kerja sama antar SKPD dan diawasi oleh tim percepatan pembangunan destinasi wisata yang dibentuk oleh PEMDA.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun Rencana Kegiatan, Dinas Pariwisata tetap mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dimulai dengan menetapkan kebutuhan/prioritas Dinas yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD.

Namun dalam proses perencanaan tersebut tetap ditemui perbedaan antara rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD,

atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifatnya pekerjaan mendesak yang harus dilaksanakan disebabkan adanya program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan yang harus juga dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada table 2.4.1 berikut ini :

Tabel 2.4.1
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
 Kabupaten Pasaman Barat

OPD : Dinas Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PASBAR	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) di Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya	1 DTW	1.000.825.447	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PASBAR	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) di Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya	1 DTW	1.000.825.447	
I	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	PASBAR	Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata	41 unit	250.825.447	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	PASBAR	Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata	41 unit	250.825.447	
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola	1 destinasi	250.825.447	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola	1 destinasi	250.825.447	
II	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola	1 kawasan Geopark	650,000,000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola	1 kawasan Geopark	650,000,000	
No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	an Penti ng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah kawasan Geopark(Taman Bumi) yang ditetapkan	1 Kawasan	300,000,000	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah kawasan Geopark(Taman Bumi) yang ditetapkan	1 Kawasan	300,000,000	
3	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPAR) Kab. Pasaman Barat	1 Dokumen	350,000,000	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPAR) Kab. Pasaman Barat	1 Dokumen	350,000,000	
III	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata	41 unit	100,000,000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata	41 unit	100,000,000	
4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata	2 unit	100,000,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata	2 unit	100,000,000	
II	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PASBAR	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	1.25.500 2. Rp.902.7 77.242	297,256,407	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PASBAR	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	1.25.500 2. Rp.902.7 77.242	297,256,407	
IV	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	5 promosi	297,256,407	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	5 promosi	297,256,407	
No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting ing
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
5	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jenis media promosi (Media Cetak dan Elektronik)	4 media	150,256,407	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jenis media promosi (Media Cetak dan Elektronik)	4 media	150,256,407	
6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah even pariwisata dan atraksi kesenian pada destinasi wisata	2 kali	50,000,000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah even pariwisata dan atraksi kesenian pada destinasi wisata	2 kali	50,000,000	
7	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jumlah Data Statistik Kepariwisataan Kab.Pasaman Barat	1 buku	48,000,000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jumlah Data Statistik Kepariwisataan Kab.Pasaman Barat	1 buku	48,000,000	
8	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jumlah bauran promosi tingkat provinsi/Nasional	1 kali	49,000,000	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jumlah bauran promosi tingkat provinsi/Nasional	1 kali	49,000,000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PASBAR	Percentase kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	15%	192,041,430	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PASBAR	Percentase kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	15%	192,041,430	
No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
V	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PASBAR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang handal	34%	162,041,430	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PASBAR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang handal	34%	162,041,430	
9	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PASBAR	Jumlah pembinaan terhadap sub sektor ekonomi kreatif	5 kali	30,000,000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PASBAR	Jumlah pembinaan terhadap sub sektor ekonomi kreatif	5 kali	30,000,000	
10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	PASBAR	Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah dibina	10 kelompok	42,041,430	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	PASBAR	Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah dibina	10 kelompok	42,041,430	
11	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa/siswa)	PASBAR	jumlah pelatihan Dasar SDM kepariwisataan yang dilaksanakan	4 kali	30,000,000	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa/siswa)	PASBAR	jumlah pelatihan Dasar SDM kepariwisataan yang dilaksanakan	4 kali	30,000,000	
12	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	PASBAR	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang bersertifikat	20 Orang	30,000,000	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	PASBAR	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang bersertifikat	20 Orang	30,000,000	
No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
13	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah produk ekonomi kreatif yang difasilitasi	15 Produk	30,000,000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah produk ekonomi kreatif yang difasilitasi	15 Produk	30,000,000	
VI	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	PASBAR	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki lisensi	10%	30,000,000	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	PASBAR	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki lisensi	10%	30,000,000	
14	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah Pelatihan/Bimtek ekonomi kreatif yang dilaksanakan	2 Kali	30,000,000	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah Pelatihan/Bimtek ekonomi kreatif yang dilaksanakan	2 Kali	30,000,000	
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPAR	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	3,126,011,469	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPAR	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	3,126,011,469	
VII	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPAR	Persentase realisasi keuangan	100%	2,660,210,949	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPAR	Persentase realisasi keuangan	100%	2,660,210,949	
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPAR	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	18 Orang	2,508,621,054	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPAR	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	18 Orang	2,508,621,054	
16	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPAR	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	7 Orang	77,350,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPAR	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	7 Orang	77,350,000	
No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
17	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPAR	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	70,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPAR	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	70,000,000	
VIII	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPAR	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata	438 Unit	40,750,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPAR	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata	438 Unit	40,750,000	
18	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISPAR	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD pada Dinas Pariwisata	2 Orang	20,100,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISPAR	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD pada Dinas Pariwisata	2 Orang	20,100,000	
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPAR	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah nistrasi dan pengamanan BMD pada Dinas Pariwisata	1 Orang	20,650,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPAR	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah nistrasi dan pengamanan BMD pada Dinas Pariwisata	1 Orang	20,650,000	
IX	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPAR	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	10 Orang	15,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPAR	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	10 Orang	15,000,000	
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISPAR				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISPAR				
No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	DISPAR	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	10 Orang	15,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	DISPAR	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	10 Orang	15,000,000	
X	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPAR	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%	204,266,220	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPAR	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%	204,266,220	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	DISPAR	Jumlah Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor pada Dinas Pariwisata	1 Paket	2,817,740	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	DISPAR	Jumlah Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor pada Dinas Pariwisata	1 Paket	2,817,740	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISPAR	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	25,749,630	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISPAR	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	25,749,630	
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISPAR	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dispar yang dibutuhkan	1 Paket	10,201,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISPAR	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dispar yang dibutuhkan	1 Paket	10,201,000	
No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					Catatan

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISPAR	Jumlah Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor pada Dinas Pariwisata	15 Kali	165,497,850	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISPAR	Jumlah Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor pada Dinas Pariwisata	15 Kali	165,497,850	
XI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISPAR	Persentase pengadaan	100%	75,500,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISPAR	Persentase pengadaan	100%	75,500,000	
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISPAR	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	10 Unit	75,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISPAR	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	10 Unit	75,500,000	
XII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPAR	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan	100%	41,429,300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPAR	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan	100%	41,429,300	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPAR	Frekuensi penyediaan kebutuhan komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	20,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPAR	Frekuensi penyediaan kebutuhan komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	20,500,000	
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPAR	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 Orang	20,929,300,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPAR	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 Orang	20,929,300,00	
No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022					

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
XIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPAR	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	88,855,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPAR	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	88,855,000	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPAR	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	10 unit 3 orang	73,355,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPAR	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	10 unit 3 orang	73,355,000	
29	Pemeliharaan/R eha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPAR	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	15 Unit	15,500,000	Pemeliharaan/R eha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPAR	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	15 Unit	15,500,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Dinas Pariwisata Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Pariwisata

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Di dalamnya tertuang Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2020-2024 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni : “Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju dan Bangkit Bersama Bangsa - Bangsa Asia Lainnya”.

Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2020-2024 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2020-2024, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2020-2024 adalah :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan

4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Sasaran, Indikator dan Target RPJMN Kemenparekraf
2020 – 2024

No	Sasaran	Indikator		Target 2020	Target 2024
1	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi	1	Penumbuhan start-up (kontribusi start-up Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	700 unit (akumulatif)	3.500 unit (akumulatif)
2	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	2.	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	4,8%	5,5%
		3.	Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan	3 Destinasi	8 Destinasi
		4.	Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas
		5	Destinasi wisata bahari	7 Destinasi	7 Destinasi
		6	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. 1.214 triliun	Rp.1.846 triliun
		7	Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi	4 kab/kota	20 kab/kota (kumulatif)
		8.	Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan	8 lokasi	11 lokasi

		9	Revitalisasi ruang kreatif	30 unit	42 unit
		10	Kontribusi ekonomi digital	3,2%	4,7%
		11.	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*)	13 juta orang	15 juta orang
		12	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang
3	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	13	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))	USD 21 Milyar	USD 32 Milyar
		14	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a))	18 juta orang	24 juta orang
		15	Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration)	4 lokasi	20 lokasi (kumulatif)
		16	Nilai ekspor ekonomi kreatif	USD 21,5-22,3 miliar	USD 24,5 miliar
		17.	Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b))	312 juta perjalanan	350-400 juta perjalanan
		18	Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi
		19	Skema pembiayaan berbasis HKI	1 skema	1 skema
		20	Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500 orang	1.500 orang
4	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi				

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Misi 3 Kepala Daerah, yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2022 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
			2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif
			3.	Meningkatnya Akuntabilitas KinrjaDinas Pariwisata	Peningkatan nilai SAKIP Level Maturitas SPIP Persentase penurunan temuan BPK

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengembangan kepariwisataan untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan Visi : Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera.

Secara umum rencana program Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 4 (Empat) program yang terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan.

Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat

a. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pariwisata

Tujuan :

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata

Sasaran :

1. Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata

b. Nama Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Pariwisata

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri

dari 6 kegiatan yaitu :

- a. Administrasi keuangan perangkat daerah
- b. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- c. Administrasi umum perangkat daerah
- d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 2 kegiatan

yaitu :

- a. Pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- a. Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri

dari 1 kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Nama Program dan Kegiatan
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata	1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata - Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota - Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Program Pemasaran Pariwisata - Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Berkembangnya Industri Kreatif Daerah	Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha ekonomi kreatif		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Pelayanan - Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Level Maturitas SPIP		
		Persentase		

			penurunan temuan BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2022 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan bidang urusan pemerintahan yaitu Bidang Pariwisata. Untuk program, kegiatan dan indikator program dan kegiatan serta rencana tahun 2022 yang meliputi lokasi program/kegiatan, target capaian kinerja, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta perkiraan maju tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Dana APBD** sebesar Rp. 3.895.445.017 dengan rincian :

- Gaji dan TPP : Rp 2.577.901.469,-
- Tenaga Harian Lepas (THL) : Rp 375.700.000,-
- Belanja Rutin : Rp 172.410.000,-
- Kegiatan Prioritas OPD : Rp 1.652.004.715,-

dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat, November 2021
Kepala Dinas



DECKY HARMIKO SAPUTRA
NIP. 19791207 200312 1 004

